



PERSEPSI DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DARAJAT GARUT

Gerry Al Hasyir, Aceng Hidayat, Ahyar Ismail
Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor
Jalan Raya Dramaga Bogor, 16680 Jawa Barat
No. HP: 081223654509, 081317304348, 08128285194
e-mail: gerryalhasyir@gmail.com, a.hidayat.esl@gmail.com, ahyaris@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 23 November 2019, direvisi tanggal 16 Januari 2020,
disetujui tanggal 19 Maret 2020

Abstrak

Pengelolaan Kawasan Wisata Darajat telah memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Terdapat perbedaan persepsi antara para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan yang menyebabkan tidak optimalnya peran para pemangku kepentingan. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang saat ini diimplementasikan masih menyisakan permasalahan yang mengancam keberlanjutan kawasan wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi para pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan dan perannya dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Persepsi dan Analisis Pemangku Kepentingan untuk menjelaskan persepsi serta peran pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan persepsi pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan Kawasan Wisata Darajat yang ditinjau dari lima aspek keberlanjutan wisata berada dalam kondisi kurang berkelanjutan. Empat dari lima aspek yang berada dalam kondisi kurang berkelanjutan antara lain : yaitu aspek kebijakan dan pengelolaan; kelayakan pekerjaan dan sumberdaya manusia; pengurangan kemiskinan dan keterlibatan sosial; kelestarian lingkungan dan budaya. Satu-satunya aspek yang dipersepsikan dalam kondisi berkelanjutan adalah aspek performa ekonomi, investasi dan daya saing. Hasil Analisis Pemangku Kepentingan menunjukkan bahwa masih terdapat pemangku kepentingan yang belum berada dalam posisi yang tepat dilihat dari tingkat pengaruh dan kepentingannya dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat sehingga perlu meningkatkan peran dan kapasitasnya, terutama masyarakat lokal yang masih berperan sebagai *penonton* dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat.

Kata-kata Kunci: Kawasan Wisata Darajat; Keberlanjutan; Pemangku Kepentingan; Peran; Persepsi

Abstract

Darajat Tourism Area management has generated both positive and negative impact toward community. There are different perceptions among the stakeholders regarding the management of the tourism which causes suboptimal roles of the pemangku kepentingan. This condition causes the policy implemented by the stakholders still leaves problem that threaten the sustainability of tourism area. The purpose of this study is to analyze the perceptions of stakeholders regarding sustainability and its role in the management of the Darajat Tourism Area. The methods used in this research are Perception Analysis and Stakeholder Analysis to explain the perceptions and roles of pemangku kepentingan. The

results showed the stakeholders perceptions regarding the sustainability of the Darajat Tourism Area in terms of the five aspects of sustainable tourism is on less sustainable condition Four of the five aspects that are in a less sustainable condition include : the aspects of policy and management; job condition and human resources; poverty reduction and social involvement; environmental and cultural sustainability. The only aspects perceived in a sustainable condition are aspects of economic performance, investment and competitiveness. The results of the Stakeholder Analysis showed that there are still stakeholders who are not in the proper position in terms of their level of influence and importance in the management so that it is necessary to increase their role and capacity, especially local communities who still play a role as spectators in the management of the Darajat Tourism Area.

Key Words: *Darajat Tourism Area; Perception; Roles; Stakeholders; Sustainability*

Pendahuluan

Potensi pariwisata di Kawasan Wisata Darajat berupa sumber air panas alami dan panorama dataran tinggi yang unik membuat kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Garut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 – 2031. Pengembangan Kawasan Wisata Darajat ini merupakan proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kawasan. Putri dan Manaf (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata dapat memberikan kesempatan usaha bagi masyarakat lokal yaitu dengan cara memasarkan berbagai komoditi dan pelayanan, membuka peluang bagi upaya untuk mendiversifikasikan ekonomi lokal yang dapat menyentuh kawasan-kawasan marginal dan membuka peluang bagi usaha-usaha ekonomi padat karya yang berskala kecil dan menengah. Kondisi tersebut tentu secara langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal yang nantinya akan meningkatkan perekonomian. Di sisi lain pengelolaan

Kawasan Wisata Darajat ini tidak hanya memberikan dampak positif. Penelitian Fajriah dan Mussadun (2014) menyimpulkan bahwa reaksi dari pengembangan suatu pariwisata ini dapat juga berupa dampak negatif berupa degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya untuk aktivitas pariwisata.

Lebih lanjut Lee dan Syah (2018) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata seperti pembangunan fasilitas, konsumsi energi untuk bangunan dan transportasi, penggunaan air yang berlebihan serta timbulan sampah dan pembuangannya bertanggung jawab kepada degradasi lingkungan. Dampak negatif ini jika dibiarkan akan mengancam keberlanjutan dari Kawasan Wisata Darajat karena seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan maka dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akan semakin besar pula. Berdasarkan kondisi tersebut pengelolaan Kawasan Wisata Darajat tentu harus sesuai dengan kaidah keberlanjutan untuk memaksimalkan dampak positif dan menekan dampak negatif yang timbul. Namun saat ini pengelolaan Kawasan Wisata Darajat cenderung untuk

mengabaikan dampak-dampak buruk yang ditimbulkan. Tidak sesuai dengan peraturan dalam pengelolaan dengan pengelolaan eksisting menjadi suatu masalah yang harus dikaji. Kondisi ini diduga terjadi karena tidak sepehamnya pemangku kepentingan pariwisata tentang apa yang menjadi arah tujuan pengembangan yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Nurrochmat *et al.* (2016) menambahkan bahwa beberapa kebijakan tidak efektif mencapai tujuan karena ditolak oleh sebagian besar masyarakat sejak awal kelahirannya karena isinya dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat, sebagian kebijakan yang lain tertatih dalam tataran implementasi. Sabir *et al.* (2018) menjelaskan bahwa sebuah dinamika kebijakan pengelolaan suatu kawasan dicirikan oleh besarnya kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya yang dicirikan dengan beragamnya karakteristik dan orientasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan.

Pemetaan persepsi dan peran yang dimiliki para pemangku kepentingan dalam hal ini yang secara umum adalah pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Tingkat pemahaman yang berbeda terhadap pengelolaan Kawasan Wisata Darajat diduga akan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi. Arifin *et al.* (2017) merangkum bahwa persepsi adalah proses pemberian makna, interpretasi dari stimuli dan sensasi yang diterima oleh individu dan sangat dipengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal dari masing-masing individu tersebut. Sadri dan Flammia (2014) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu kebijakan adalah

sosial budaya, pemahaman individu dan dampak dari kebijakan itu sendiri.

Keberlanjutan kawasan merupakan sesuatu yang harus dicapai agar pengelolaan kawasan dapat optimal tanpa merusak lingkungan, oleh karena itu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan harus ikut serta dalam pengembangan kawasan. Menurut Putri dan Maresfin (2015) alasan perusakan lingkungan dapat dijawab melalui dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, sudut pandang moral dan etika, merusak lingkungan adalah perilaku manusia yang tidak bermoral dan tidak beretika. Kedua, dari sudut pandang ekonomi yang dititikberatkan pada bagaimana ekonomi dan lembaga lembaga ekonomi dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat mengarahkan kepada perusakan lingkungan. Agustina *et al.* (2018) menjelaskan bahwa persepsi pemangku kepentingan dalam wisata berperan penting dalam pengembangan wisata, pemangku kepentingan dengan persepsi yang mendukung pengembangan wisata telah membantu perencanaan dan pengelolaan wisata. Kemudian Susilo *et al.* (2016) menjelaskan bahwa dengan mengetahui peran pemangku kepentingan maka akan terdapat sarana untuk memperbaiki komunikasi, mendapat dukungan masyarakat, mengumpulkan data dan ide yang bermanfaat dan memberikan ruang yang lebih luas bagi pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Sehingga penelitian mengenai bagaimana persepsi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan juga peran mereka didalamnya menjadi menarik untuk dikaji. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan

dalam penelitian ini adalah menganalisis persepsi dan peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat.

Metode Penelitian

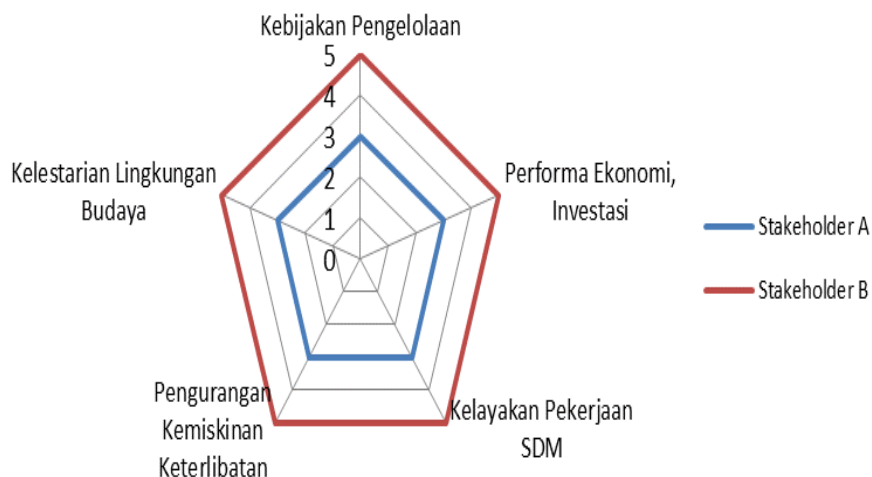
Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Wisata Darajat, Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Adapun responden dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat yang dipilih berdasarkan *snowball sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan cara *in-depth interview* dengan *key person* dari masing-masing pemangku kepentingan. Kemudian metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan dalam penelitian ini adalah Analisis Persepsi yang menggunakan Skala Likert dan Analisis Pemangku kepentingan

Analisis Persepsi

Persepsi dari para pemangku kepentingan kegiatan pariwisata di Kawasan Wisata Darajat dikaji dengan analisis persepsi menggunakan Skala Likert yaitu metode penskalaan

pernyataan sikap/persepsi yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya (Muller, 1996). Penilaian persepsi yang dilakukan di Kawasan Wisata Darajat adalah persepsi keberlanjutan yang dibagi kepada 5 aspek yaitu : 1) Kebijakan dan pengelolaan; 2) Performa ekonomi, investasi dan daya saing; 3) Kelayakan pekerjaan dan sumberdaya manusia; 4) Pengurangan kemiskinan dan keterlibatan sosial; dan 5) Kelestarian lingkungan dan budaya. Setiap aspek terdapat sub aspek yang akan diberi skor oleh para responden yang nantinya skor tersebut akan disajikan kedalam grafik polarisasi seperti Gambar 1.

Dari Gambar 1 tersebut, titik 0 menggambarkan kondisi yang kurang berkelanjutan, hal ini berarti semakin dekat dengan titik 0 maka pemangku kepentingan beranggapan bahwa pengelolaan Kawasan Wisata Darajat berada dalam kondisi yang kurang berkelanjutan yang berarti semakin jauh dari titik 0 atau semakin mendekati titik 5 maka kondisi pengelolaan mengarah kepada kondisi yang berkelanjutan.



Gambar 1 Grafik Polarisasi Persepsi

Sumber: diolah (2019)

Analisis Pemangku Kepentingan

Identifikasi peran pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan metode Pemangku kepentingan *Analysis* yang memetakan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap suatu sumberdaya Freeman (2010).

Adapun tahapan Pemangku kepentingan *Analysis* dalam penelitian ini adalah :

1. Identifikasi pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan.
2. Membuat tabel pemangku kepentingan yang berisi informasi :
 - a. Daftar pemangku kepentingan
 - b. Tingkat kepentingan pemangku kepentingan dengan skala likert
 - c. Tingkat pengaruh pemangku kepentingan dengan skala likert.
 - d. Selanjutnya dibuat diagram seperti Gambar 2 untuk mengetahui tingkat kepentingan dan pengaruh serta posisi masing masing pemangku kepentingan apakah

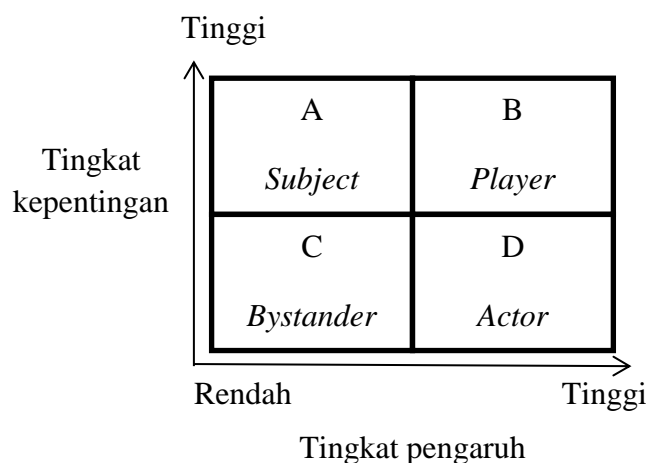
termasuk pada kategori *player*, *bystander*, *actor* atau *subject*.

Kotak A (*Subject*) merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi terhadap pemanfaatan tetapi rendah pengaruhnya mencakup anggota organisasi yang melakukan kegiatan dan responsif terhadap pelaksanaan pemanfaatan tetapi bukan pengambil kebijakan.

Kotak B (*Player*) merupakan kelompok pemangku kepentingan yang memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk mensukseskan kegiatan seperti tokoh masyarakat, kepala instansi terkait dan kepala pemerintahan.

Kotak C (*Bystander*) mewakili pemangku kepentingan yang rendah pengaruh dan kepentingannya. kepentingan dan pengaruhnya tidak mengubah kondisi pemanfaatan kawasan

Kotak D (*Actor*) merupakan pemangku kepentingan yang terpengaruh tetapi rendah kepentingannya dalam pencapaian tujuan dan kebijakan.



Gambar 2 Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan

Sumber : Freeman (2010)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persepsi merupakan penilaian yang diberikan dari pemangku kepentingan tergantung kepada apa yang dipahami dan dirasakan oleh pemangku kepentingan itu sendiri. Responden dari analisis persepsi adalah *key person* dari setiap pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat.. Persepsi yang dikaji dalam penelitian ini adalah persepsi

mengenai pengelolaan berkelanjutan yang terbagi menjadi 5 aspek. Kemudian dari setiap aspek tersebut terdapat subbagian yang responden diminta untuk diberikan skor. Berikut adalah rincian aspek dan subbagian untuk analisis persepsi keberlanjutan pengelolaan Kawasan Wisata Darajat yang terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1 Aspek Pariwisata Berkelanjutan

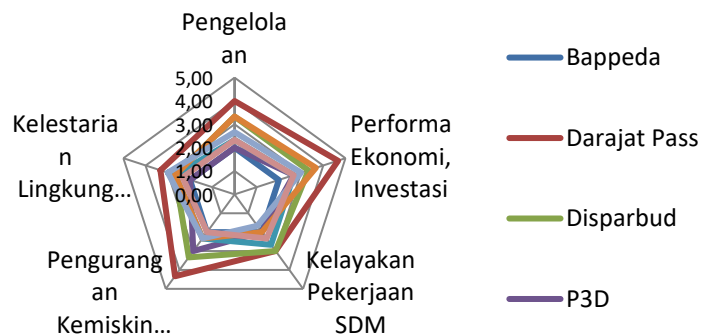
Aspek Kebijakan dan Pengelolaan	Aspek Performa Ekonomi, Investasi dan Daya Saing	Aspek Kelayakan Pekerjaan dan Sumberdaya Manusia	Aspek Pengurangan Kemiskinan dan Keterlibatan Sosial	Aspek Kelestarian Lingkungan dan Budaya
Relevansi peraturan pengelolaan	Manfaat ekonomi lokal	Kondisi lapangan pekerjaan	Pengurangan kemiskinan	Kualitas lingkungan dan budaya
Kejelasan peraturan pengelolaan	Kemudahan bisnis dan investasi	Kesadaran wisata	Keterlibatan masyarakat	Keselarasn lingkungan dan budaya
Implementasi peraturan pengelolaan	<i>Branding</i> dan pemasaran wisata	Keterampilan wisata	Intensitas Konflik	Dampak buruk kepada lingkungan dan budaya

Sumber : UNWTO, 2013

Berdasarkan skor yang diberikan responden diperoleh hasil bahwa kondisi pengelolaan Kawasan Wisata Darajat cenderung mengarah kepada arah kurang berkelanjutan. Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat nilai persepsi yang berbeda beda dari setiap aspek keberlanjutan

mayoritas responden memberikan persepsi di bawah skor 3 yang artinya aturan mengenai pengelolaan Kawasan Pariwisata masih belum mengarah kepada keberlanjutan hal ini dapat disebabkan karena kurang jelasnya aturan yang mengakibatkan implementasi peraturan menjadi kurang efektif.

Namun dapat terlihat bahwa dalam aspek kebijakan dan pengelolaan



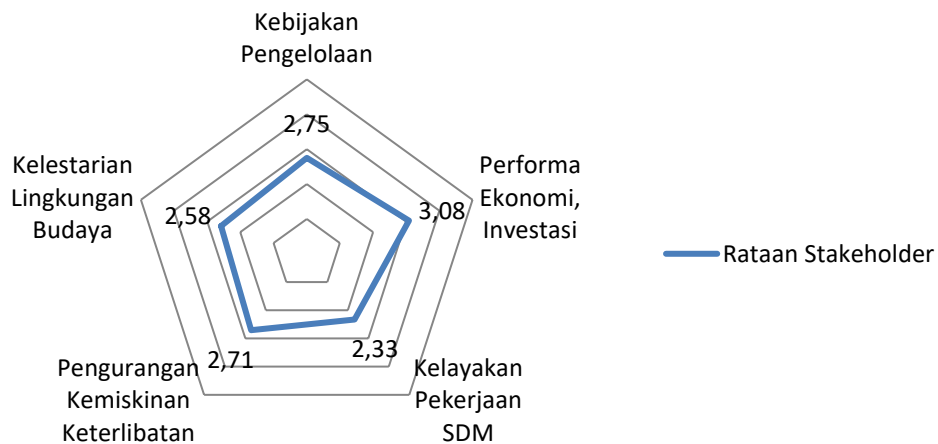
Gambar 3 Hasil Persepsi Tiap Pemangku kepentingan

Sumber : data primer, diolah (2019)

Kemudian aspek performa ekonomi, investasi dan daya saing, mayoritas responden menyatakan bahwa pengelolaan saat ini telah mampu mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, namun dalam hal kemudahan usaha dan investasi masih rendah. Aspek kelayakan pekerjaan dan sumberdaya manusia merupakan aspek yang memiliki skor persepsi dengan mayoritas skor dibawah 3 yang dapat diartikan bahwa lapangan kerja yang tercipta masih sangat sedikit serta kesadaran wisata masyarakat yang masih rendah ditambah lagi masyarakat tidak mempunyai keahlian di bidang pariwisata.

Selanjutnya adalah aspek pengurangan kemiskinan dan keterlibatan masyarakat yang sama halnya dengan aspek pertama mempunyai mayoritas skor

yang rendah yang dapat diartikan bahwa pengelolaan belum bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan namun dari segi intensitas konflik sangat rendah. Terakhir adalah aspek kelestarian lingkungan dan budaya yang juga mengarah kepada arah kurang berkelanjutan dengan skor persepsi yang rendah, responden beranggapan bahwa kualitas lingkungan dan budaya di Kawasan Wisata Darajat cukup buruk serta dampak lingkungan yang timbul cukup tinggi yang dapat dilihat dari timbulnya sampah dan kemacetan seiring dengan datangnya pengunjung ke kawasan , untuk memudahkan melihat gambaran persepsi mengenai keberlanjutan Kawasan Wisata Darajat, persepsi dari tiap responden dapat digabungkan seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Hasil Persepsi Gabungan
Sumber : data primer, diolah (2019)

Seperti terlihat dalam Gambar 4. hampir seluruh aspek keberlanjutan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat

berada pada skor dibawah 3 yaitu aspek kebijakan dan pengelolaan (2,75); kelayakan pekerjaan dan sumberdaya

manusia (2,33); pengurangan kemiskinan dan keterlibatan sosial (2,71); dan kelestarian lingkungan dan budaya (2,58). Satu satunya aspek keberlanjutan yang mempunyai skor diatas 3 adalah aspek performa ekonomi, investasi dan daya saing dengan skor (3,08).

Terdapat 8 pemangku kepentingan yang terlibat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan wawancara mendalam diperoleh hasil sebagaimana terlihat di Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Identifikasi pemangku kepentingan terhadap pengelolaan Kawasan Wisata Darajat

Pemangku kepentingan	Peran dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat	Kepentingan terhadap pengelolaan Kawasan Darajat
Bappeda	Koordinasi implementasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Garut dengan lembaga lain terkait.	Tercapai pembangunan pariwisata yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Garut
Disparbud	Pengelola Kawasan Wisata Darajat	Mengembangkan Wisata Darajat menjadi wisata berwawasan lingkungan
DLH	Pengawasan dan evaluasi lingkungan hidup pelaksanaan pariwisata	Mengurangi dampak lingkungan wisata dan mempertahankan fungsi lingkungan kawasan
DP	Pengusaha obyek wisata di Kawasan Wisata Darajat	Bisnis
P3D	Pemberdayaan masyarakat di kawasan sekaligus pengawasan	Memberdayakan masyarakat dalam bidang wisata dan lingkungan
Desa Karyamekar	Pengawasan	Pengawasan pelaksanaan pariwisata di kawasan
UNIGA	Akademisi/peneliti	Pengembangan ilmu
Masyarakat Lokal	Pelaku unit usaha di kawasan wisata	Sumber mata pencaharian

Sumber : data primer, diolah (2019)

Setelah identifikasi peran dari masing-masing pemangku kepentingan langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya. Bentuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam suatu pengelolaan wisata ditentukan dari kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda. Kepentingan merupakan

ketergantungan atau ketertarikan pemangku kepentingan terhadap suatu sumberdaya atau pengelolaanya, sedangkan pengaruh merupakan kemampuan dan kapasitas dari pemangku kepentingan untuk memengaruhi suatu pengelolaan atau pemangku kepentingan lainnya. Penilaian tingkat pengaruh dari setiap pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Tingkat Pengaruh Pemangku kepentingan Pengelolaan Kawasan Wisata Darajat

Pemangku kepentingan	P1	P2	P3	P4	P5	Nilai
Bappeda	3	1	2	1	1	8
Disparbud	4	2	1	2	1	10
DLH	3	3	2	3	4	15
Darajat Pass	5	4	4	5	5	23
P3D	2	1	2	3	3	11

Desa Karyamekar	2	1	3	2	2	10
UNIGA	3	1	2	2	3	11
Masyarakat Lokal	1	1	1	3	1	7

Sumber : data primer, diolah (2019)

Keterangan :

P1 : Kondisi Kekuatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat

P2 : Kondisi Kelayakan Kawasan Wisata Darajat bagi pemangku kepentingan

P3 : Kekuatan Kompensasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat

P4 : Kekuatan Kepribadian pemangku kepentingan terkait pengelolaan Kawasan Wisata Darajat

P5 : Kekuatan organisasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat

Berdasarkan Tabel 3, pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh paling tinggi dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat adalah Darajat Pass, karena Darajat Pass merupakan pemilik obyek wisata yang menjadi daya tarik di Kawasan Darajat sehingga mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan wisata dan mampu memengaruhi pemangku kepentingan lainya dalam pengelolaan terutama masyarakat yang bekerja dan yang mempunyai usaha di sekitar obyek wisata Darajat Pass. Kemudian DLH mempunyai pengaruh yang cukup tinggi, karena mempunyai kapasitas dalam hal pemberian izin dan evaluasi lingkungan hidup di Kawasan Wisata Darajat yang

merupakan kawasan dataran tinggi yang mempunyai fungsi lindung serta adanya dampak lingkungan berupa timbulan sampah dan kemacetan.

Selanjutnya Bappeda dan Disparbud merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai pengaruh yang rendah dalam pengelolaan karena tidak terlibat langsung, keterlibatan hanya berupa pengawasan saja. Begitupun P3D, Desa Karyamekar, dan Masyarakat Lokal mempunyai pengaruh yang rendah dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat, keterlibatan hanya dalam bentuk pemberdayaan tenaga kerja dan peluang usaha yang masih rendah. Sedangkan UNIGA sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan.

Tabel 4 Tingkat Kepentingan Pemangku kepentingan Pengelolaan Kawasan Wisata Darajat

Pemangku kepentingan	K1	K2	K3	K4	K5	Nilai
Bappeda	3	3	2	1	1	10
Disparbud	5	5	3	3	3	19
DLH	4	3	4	4	1	16
Darajat Pass	5	5	5	5	4	24
P3D	2	4	3	5	5	19
Desa Karyamekar	2	3	4	1	1	11
UNIGA	3	2	2	2	1	10
Masyarakat Lokal	2	4	2	1	3	12

Sumber : data primer, diolah (2019)

Keterangan :

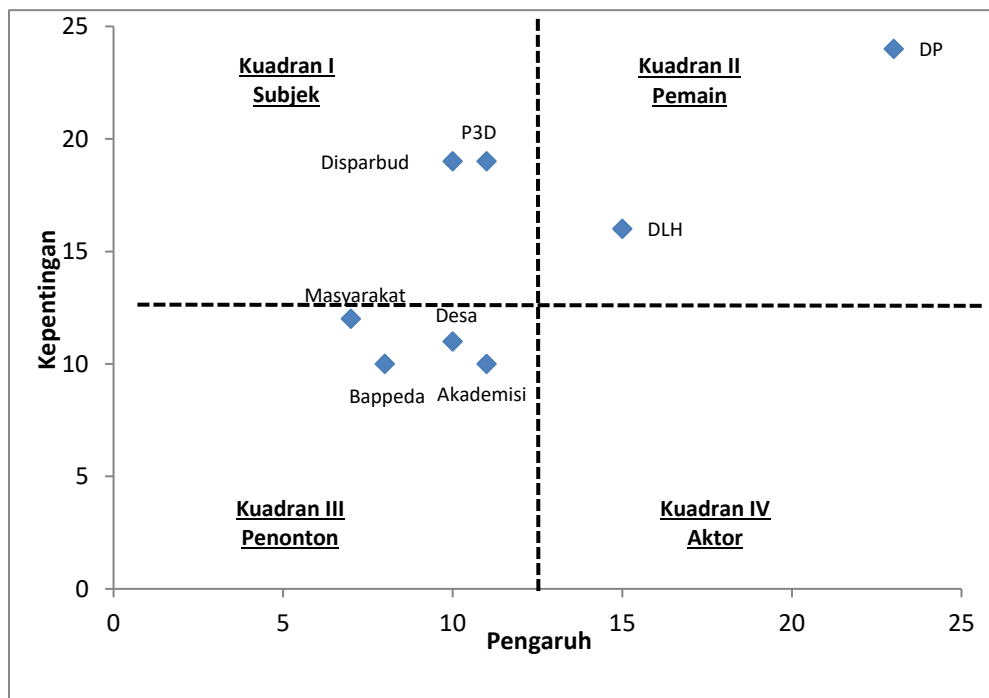
K1 : Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat

K2 : Manfaat pengelolaan Kawasan Wisata Darajat bagi pemangku kepentingan

- K3 : Kewenangan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat
- K4 : Program kerja pemangku kepentingan terkait pengelolaan Kawasan Wisata Darajat
- K5 : Tingkat ketergantungan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat

Tabel 4 menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dengan kepentingan tertinggi adalah Darajat Pass karena seluruh pengelolaan obyek wisata dikelola oleh Darajat Pass, selain itu juga Darajat Pass mampu membuka lapangan pekerjaan yang menjadi sumber penerimaan dari pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya lembaga pemerintah seperti Disparbud dan DLH mempunyai kepentingan yang tinggi karena fungsi utama wisata dan dampak dari kegiatan wisata memang merupakan bidang fungsi dari pemangku kepentingan tersebut sedangkan Bappeda mempunyai kepentingan yang rendah karena hanya terlibat dalam perencanaan dan evaluasi saja. P3D merupakan pemangku

kepentingan yang mempunyai ketergantungan tinggi dalam pengelolaan karena pemberdayaan masyarakat di bidang wisata merupakan tujuan utamanya. Desa Karyamekar, Masyarakat lokal dan UNIGA mempunyai kepentingan yang rendah, meskipun memang Desa Karyamekar dan Masyarakat Lokal menjadikan wisata sebagai mata pencaharian namun jumlah masyarakat yang terlibat masih sangat sedikit, sedangkan UNIGA hanya mempunyai kepentingan sebatas pengembangan keilmuan atau penelitian. Besarnya pengaruh dan kepentingan dari pemangku kepentingan kemudian dipetakan ke dalam pemangku kepentingan *grid* (Gambar 5)



Gambar 5 Pemangku kepentingan *Grid* Pengelolaan Kawasan Wisata Darajat
 Sumber : data primer, diolah (2019)

Berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan pada Gambar 5, masyarakat masuk kedalam kelompok Penonton yang mempunyai tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan yang sama-sama rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata yang ada di kawasan karena keterbatasan penyerapan tenaga kerja yang dimiliki oleh Darajat Pass sebagai pemilik dan pengelola obyek wisata dan keterbatasan modal dan lahan serta keterampilan untuk mendirikan suatu unit usaha. Seharusnya keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara pemberdayaan masyarakat dalam bidang usaha yang mendukung pariwisata seperti penyedia akomodasi dan jasa di bidang pariwisata yang bisa dibentuk dengan skema kerjasama dengan pemilik modal dan lahan serta pemangku kepentingan lainnya seperti Disparbud, Bappeda, P3D yang terkait. Sehingga tingkat kepentingan dan pengaruh yang dimiliki masyarakat dapat menjadi lebih tinggi tidak hanya lagi sebagai penonton saja dalam pengelolaan. Sama halnya dengan Desa Karyamekar, seharusnya desa mempunyai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang lebih terhadap pengelolaan, tidak hanya sebatas pemberian izin dan pengawasan saja namun desa perlu mendorong terjadinya kerjasama antar pemilik modal dan lahan dengan masyarakat lokal sehingga desa dan masyarakat lokal akan lebih berdaya dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat.

Peran Universitas Garut sebagai akademisi masih sebagai Penonton, seharusnya peran akademisi lebih ditingkatkan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat. Akademisi memiliki peran

dalam pengembangan wisata yang berkelanjutan, peran akademisi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lokal serta memberikan masukan dalam penetapan kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Darajat yang berkelanjutan.

Selanjutnya, posisi Bappeda masuk ke dalam kelompok Penonton dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat. Bappeda sebagai perencana yang menetapkan RTRW daerah seharusnya mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan. Meskipun pendirian objek wisata di Kawasan Wisata Darajat didirikan dalam kawasan yang mempunyai fungsi utama budidaya dan merupakan lahan milik, tetapi fungsi lindung yang dimiliki kawasan tidak bisa diabaikan sehingga dibutuhkan suatu perencanaan dan pengawasan kawasan yang tetap menguntungkan secara finansial dan fungsi lindung kawasan yang lestari. Bappeda sebagai perencana pembangunan harus ikut terlibat secara langsung dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat agar dapat merumuskan aturan atau kebijakan perencanaan dan pengembangan yang mengarah ke keberlanjutan.

Disparbud yang diharapkan menjadi motor penggerak dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat hanya berperan sebagai Subjek dan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi saja, namun tidak memiliki tingkat pengaruh yang tinggi. Hal ini berarti bahwa Disparbud belum mampu untuk memengaruhi pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan. Pada nyatanya obyek wisata yang terdapat di Kawasan

Wisata Darajat dimiliki oleh perseorangan yang seluruh lini manajemen dikelola oleh perusahaan, sehingga Disparbud tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan obyek wisata dan kawasan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan, seharusnya pengaruh dari Disparbud dapat ditingkatkan sebagai pendukung utama pariwisata daerah yang dapat diwujudkan dengan cara pembuatan kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Darajat yang didalamnya terdapat perencanaan yang matang mengenai Kawasan Wisata Darajat yang menguntungkan bagi daerah, memberdayakan masyarakat dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kepentingan dari Disparbud.

Kemudian P3D sebagai organisasi dari masyarakat yang berperan sebagai Subjek dan pemberdaya masyarakat dalam bidang pariwisata tentu mempunyai tingkatan kepentingan yang tinggi namun dalam penelitian ini mempunyai tingkat pengaruh yang rendah. Batasan modal keuangan menjadi faktor utama dalam pemangku kepentingan ini. Kehadiran P3D dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat membantu masyarakat yang tidak bisa ikut terlibat dalam penyerapan tenaga kerja dan membuka unit usaha dan kekurangan keterampilan di bidang wisata diwadahi oleh P3D untuk diberdayakan sebagai pemandu menuju obyek wisata atau *homestay* milik masyarakat. Seharusnya terdapat kerjasama antara pemilik obyek wisata dan instansi pemerintah dengan P3D dalam hal pemberdayaan masyarakat lokal di bidang pariwisata. P3D sebagai pemangku kepentingan yang mewadahi minat masyarakat dalam hal pariwisata tentu harus diberikan dukungan agar

mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat.

DLH merupakan pemangku kepentingan yang masuk kedalam kelompok pemain yang mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi dalam pengelolaan. DLH berperan sebagai lembaga yang memberikan izin lingkungan dan juga mengawasi dampak lingkungan yang timbul akibat adanya kegiatan pariwisata di kawasan. Timbulan sampah dan kemacetan yang ditimbulkan kegiatan pariwisata merupakan hal yang sangat esensial dalam menjaga kualitas lingkungan. Posisi DLH sudah tepat berada dalam kategori pemain.

Kemudian Darajat Pass merupakan Pemain utama dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat karena merupakan pemangku kepentingan dengan tingkat kepentingan dan pengaruh paling tinggi diantara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan karena Darajat Pass merupakan pemilik usaha obyek wisata sehingga semua keputusan dan wewenang mengenai pengelolaan berada di tangan pemilik. Dalam kasus pengelolaan Kawasan Darajat, Darajat Pass sebagai pemain utama seharusnya mampu mendorong dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan. Darajat Pass sebagai pemilik modal dan pemilik lahan yang ada di kawasan diharapkan mampu membuat sebuah skema kerjasama dengan pemangku kepentingan lain khususnya masyarakat lokal. Meskipun Darajat Pass merupakan pemain utama tentunya Darajat Pass harus menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dalam pelaksanaan

pariwisata di Kawasan Wisata Darajat. Tentunya aturan dan kebijakan yang akan dirumuskan oleh pemerintah harus

Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan yang telah diutarakan, penelitian ini fokus kepada analisis persepsi dan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan Wisata Darajat. Dari hasil penelitian didapatkan simpulan bahwa persepsi pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan Kawasan Wisata Darajat ditinjau dari 5 aspek keberlanjutan pariwisata berada dalam kondisi kurang berkelanjutan. Empat dari lima aspek yaitu : aspek kebijakan dan pengelolaan; kelayakan pekerjaan dan sumberdaya manusia; pengurangan kemiskinan dan keterlibatan sosial; kelestarian lingkungan dan budaya masih dipersepsikan masih dalam kondisi yang kurang berkelanjutan. Hanya aspek performa ekonomi, investasi dan daya saing yang dipersepsikan dalam kondisi yang mengarah ke keberlanjutan. Kondisi tersebut disebabkan oleh kebijakan pengelolaan Kawasan Darajat yang belum berbasiskan masyarakat lokal sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya aliran manfaat ekonomi lokal dan belum adanya pengendalian dampak lingkungan.

Pemangku kepentingan yang terlibat adalah Disparbud dan P3D sebagai *subjek*, Darajat Pass dan DLH sebagai *pemain*, Bappeda, Desa Karyamekar, Masyarakat Lokal dan UNIGA sebagai *penonton*. Masih terdapat pemangku kepentingan yang belum berada dalam posisi yang tepat, terutama masyarakat lokal. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap modal, lahan dan keterampilan untuk ikut terlibat dalam usaha pariwisata

melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, masyarakat dan P3D.

di Kawasan Darajat. Kemudian lembaga pemerintah daerah yang belum berada dalam posisi yang tepat seperti Bappeda dan Disparbud perlu meningkatkan peran dan kapasitasnya.

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah perlunya suatu kebijakan yang mendukung pengembangan Kawasan Wisata Darajat yang berbasis masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk mengakses sumberdaya modal, lahan dan keterampilan untuk menunjang usaha pariwisata secara mandiri. Kemudian peningkatan peran Pemerintah Daerah terutama Bappeda dan Disparbud dalam pengembangan Kawasan Wisata Darajat penting untuk dilakukan agar pengelolaan lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Agustina, M., Winarno, G. D., Darmawan, A. (2018). *Polarisasi Persepsi Para Pihak dalam Pengembangan Hospitalitas Ekowisata di Unit Pengelola Wisata Kubu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)*. *Jurnal Hutan Tropis Volume 6 No. 2 : 154 -160*
- Arifin, HS., Fuady, I., Kuswarno, E. (2017). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang*. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No.1, Juli:88-101*.
- Fajriah, S. D dan Mussadun. (2014). *Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung*

- Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus : Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Volume 10 (2) : 218-233 Juni 2014*
- Freeman. E.R. (2010). *Strategic Management : A Pemangku kepentingan Approach*. Cambridge. Cambridge University Press.
- Lee, J.W dan Syah, A.M. (2018). *Economic and Environmental Impacts of Mass Tourism on Regional Tourism Destinations in Indonesia. Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol 5 No 3 (2018), page 31-41*
- Mueller, D. J. (1996). *Mengukur Sikap Sosial; Pegangan untuk Peneliti dan Praktisi*. [Terjemahan dari Eddy S. K] Jakarta Bumi Aksara.
- Nurrochmat D R, Darusman D, dan Ekayani M. (2016). *Kebijakan Pembangunan Kehutanan Dan Lingkungan*. Kota Bogor. IPB PRESS.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031. Garut .
- Putri, I.E.K. dan Maresfin N. (2015). *Ekonomi Lingkungan*. Kota Bogor (ID). IPB PRESS.
- Putri, J.H.P dan Manaf, A. (2013). *Faktor-Faktor Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata di Dataran Tinggi Dieng. Jurnal Teknik PWK. Volume 2 Nomor 3 2013*.
- Sabir, L. O., Avenzora, R., Winarnom D, G. (2018). *Persepsi Pemangku kepentingan untuk Pembangunan Ekowisata Taman Nasional Tesso Nilo. Media Konservasi Vol. 23 No. 1 April 2019 : 1 - 8*.
- Sadri, H dan Flammia, M. (2014). *Democracy, Political Perceptions, and Media. Systemic, Cybernetics and Informatics Volume 12 – Number 3 – Year 2014 : 29 – 33*
- Susilo, M,E., Prayudi., Erawati, H. (2016) Pendekatan Stakeholder Engagement dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 2, Mei – Agustus 2016 : 122 – 135*
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO), 2013. Sustainable Tourism for Development Guidebook. Madrid : *United Nation-World Tourism Organization*.